



MOHAMMAD SYAIFUDIN, NURUL ZURIAH & MARHAN TAUFIK

Revolusi Mental melalui Model Pendidikan Karakter Bangsa untuk Penguatan Kemandirian Pangan dan Cinta Produk Indonesia

RESUME: Pendidikan karakter bangsa mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan suatu "grand desain" pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa. Regulasi pendidikan karakter diatur dalam UU (Undang-Undang) Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi model pendidikan karakter bangsa dalam mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia berbasis tri pilar pusat pendidikan (informal, formal, dan nonformal) yang berlaku di Indonesia, dari masa pemerintahan Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), sampai dengan masa Reformasi (1998-sekarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi model pendidikan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia, yang pernah berlaku di Indonesia, sangat beragam; dan semuanya itu tergantung pada politik pendidikan dan kebijakan pemerintah serta nomenklatur masyarakat. Pada masa pemerintahan Orde Lama, pendidikan karakter bangsa dilakukan dalam kerangka "nation and character building"; pada masa pemerintahan Orde Baru, pendidikan karakter dilakukan dalam kerangka stabilitas nasional dan pemantapan jati diri bangsa; serta pada masa Reformasi, pendidikan karakter dilakukan dalam kerangka totalitas proses psikologis, sosial, kultural, dan bersifat multidimensional.

KATA KUNCI: Pendidikan Karakter; Pembangunan Bangsa; Revolusi Mental; Kemandirian Pangan; Cinta Produk Indonesia.

ABSTRACT: "Mental Revolution through Model of National Character Education for Strengthening the Food Self-Sufficiency and Love Indonesian Products". National character education has a strategic role in national development. To meet this is needed a grand design on character education as part of efforts to build the nation's character. Character education regulation stipulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System. This study specifically aims to study the construction of the nation's character education model to support food self-sufficiency and love Indonesian products based on three central pillar of education prevailing in Indonesia (informal, formal, and nonformal educations), since the governments era of Old Order (1959-1966), New Order (1966-1998) until the Reform era (1998 to date). The results showed that the construction of the nation's character education model to support food self-sufficiency and love Indonesian products, that ever applied in Indonesia, is very diverse; and overall is depending on the political education and government policies as well as the nomenclature of the community. At the time of the Old Order government, the nation's character education carried out within the framework of nation and character building; in the era of New Order government, the nation's character education is done within the framework of national stability and the consolidation of national identity; and in the Reform era, it carried out within the framework of the totality of the psychological, social, cultural, and multidimensional manners.

KEY WORD: Character Education; Nation's Building; Mental Revolution; Food Self-Sufficiency; Love Indonesian Products.

About the Authors: Mohammad Syaifudin, Nurul Zuriah, dan Marhan Taufik adalah Staf Pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), Jalan Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: mufud03@yahoo.com.au, zuriahnurul@gmail.com, dan marhantaufik@yahoo.co.id

How to cite this article? Syaifudin, Mohammad, Nurul Zuriah, dan Marhan Taufik. (2016). "Revolusi Mental melalui Model Pendidikan Karakter Bangsa untuk Penguatan Kemandirian Pangan dan Cinta Produk Indonesia" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.9(2) November, pp.221-234. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (January 29, 2016); Revised (July 15, 2016); and Published (November 30, 2016).

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter bangsa mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan suatu *grand desain* pendidikan karakter, sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa. Regulasi pendidikan karakter diatur dalam UU (Undang-Undang) Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS atau Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas RI, 2003). Bagi suatu bangsa, karakter adalah nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain (Koesoema, 2010; Shulhan, 2010; Sudrajat, 2010; dan Iriany, 2014).

Dalam Rencana Induk (*Grand Design*) Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa, Kementerian Pendidikan RI (Republik Indonesia) menyebutkan bahwa terdapat 3 aspek pembentuk karakter luhur bangsa, yaitu: (1) Agama, Pancasila, UUD atau Undang-Undang Dasar 1945, dan UU SISDIKNAS; (2) Teori Pendidikan, Psikologi, Nilai, dan Sosial-Budaya; serta (3) Pengalaman Terbaik dan Praktek Nyata (Nuh, 2015).

Harkat dan martabat suatu bangsa berkaitan erat dengan pendidikan yang dialami oleh suatu bangsa itu sendiri. Karena dengan pendidikan, suatu bangsa dapat menentukan karakter, sikap, dan perilakunya ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pendidikan sangatlah penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena dengan pendidikan itu suatu bangsa tidak mudah dijajah oleh bangsa lain; dengan pendidikan pulalah suatu bangsa dapat mencapai kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan yang dapat membawanya mewujudkan cita-cita bangsa; dan dengan pendidikan juga suatu bangsa dapat mengejar ketertinggalannya dari bangsa-

bangsa lain di dunia (Muttaqin *et al.*, 2006; dan Iriany, 2014).

Berbagai kemajuan dan pencapaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan keamanan maupun kesejahteraan rakyat setelah kemerdekaan, namun masih belum dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, besar, disegani, dan dihormati keberadaannya di tengah-tengah bangsa di dunia (Wibowo, 2014). Hal ini memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan, yakni perubahan yang dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun kolektif, dari warga negara Indonesia sendiri.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, ianya masih memerlukan pandangan-pandangan yang menuntut perubahan mendasar dari pola pendidikan di Indonesia. Pandangan yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak adalah “revolusi mental”, yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut beliau, revolusi mental perlu diawali dari dunia pendidikan. Maka dari itu, Jokowi (Joko Widodo) mengusulkan agar di SD (Sekolah Dasar), 80 persen pendidikan karakter, sementara 20 persen untuk pengetahuan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa di SMP (Sekolah Menengah Pertama), jatah untuk pendidikan karakter diturunkan menjadi 60% dan pengetahuan dinaikkan menjadi 40%; sementara di SMA (Sekolah Menengah Atas), pendidikan karakter menjadi 20% dan pengetahuan menjadi 80%.¹

Selanjutnya, Suratno (2014) mengatakan bahwa pendidikan karakter menjadi sangat penting karena tiga hal, yakni: *pertama*, secara makro, telah terjadi kemerosotan karakter bangsa yang ditandai oleh tingginya indeks

¹Lihat dan bandingkan, misalnya, artikel “Revolusi Mental dalam Dunia Pendidikan”. Tersedia secara online di: <http://www.riapos.co/4196-opini-revolusi-mental-dalam-dunia-pendidikan> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 18 Oktober 2016]; dan artikel “Revolusi Mental dari Presiden Joko Widodo”. Tersedia secara online di: <https://wikipedia.2014/> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 18 Oktober 2016].

korupsi, premanisme, dan kekerasan; *kedua*, secara mikro, dalam dunia pendidikan juga banyak kasus *bullying*, tawuran antar pelajar, kelemahan sistem kurikulum, dan proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pembentukan karakter bangsa; serta *ketiga*, Jokowi-JK atau Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, sejak kampanye hingga sekarang menegaskan tentang perlunya “revolusi mental” terkait tiga hal utama, yaitu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam budaya (Suratno, 2014).

Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik, yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain (Muttaqin *et al.*, 2006). Berdasarkan fenomena yang ada, dan hasil penelitian sebelumnya, terdapat dua hal yang harus mendapat perhatian secara serius. *Pertama*, munculnya fenomena menurunnya budi pekerti luhur di kalangan mahasiswa. *Kedua*, belum adanya model pendidikan karakter di PT (Perguruan Tinggi), yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dapat membentuk karakter mahasiswa, yang mencintai produk Indonesia dan mendukung kemandirian pangan (Shulhan, 2010).

Oleh karenanya, perlu dicari dan dirumuskan model pendidikan karakter bangsa untuk mencintai produk Indonesia dan mendukung kemandirian pangan yang efektif, serta dapat dilaksanakan di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pendidikan Karakter dan Revolusi Mental. Generasi penerus bangsa, yang akan menentukan masa depan bangsa ini, diharapkan lahir dari perubahan mentalitas yang dimulai saat ini. Istilah “revolusi mental” saat ini bukanlah suatu istilah yang asing lagi, semenjak pemerintahan baru Jokowi-JK (Joko Widodo – Jusuf Kalla) dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, pada bulan Oktober 2014. Mental itu sendiri berkaitan dengan pikiran (*mind*). Mentalitas juga berkaitan dengan cara

berpikir yang sudah menjadi kebiasaan berpikir, dan suatu kebiasaan (*habit*) pada umumnya terbentuk lewat pembiasaan. Sehingga, mentalitas dapat diubah dengan cara melakukan perubahan pada kebiasaan (Mulyadi *et al.*, 2008).

Pada acara kegiatan pra-musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) oleh Bappenas RI (Badan Perancang Pembangunan Nasional Republik Indonesia) pada tahun 2015, dan dipetik juga dalam Sri Lindawati (2015), disebutkan bahwa revolusi mental, secara rasional, dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, **Revolusi Mental** bermula di alam pikiran yang menuntun bangsa dalam meraih cita-cita bersama dan mencapai tujuan kolektif bernegara, yakni: memajukan kesejahteraan umum; dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kedua, **Revolusi Mental** membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern.

Ketiga, **Revolusi Mental** mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Keempat, **Revolusi Mental** dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, dan masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara (dalam Lindawati (2015).

Di dunia pendidikan, revolusi mental ditekankan pada pembentukan karakter serta pengembangan kepribadian yang dapat membentuk jati diri bangsa. Maka, tidak berlebihan bila kita menyebut guru adalah kunci dalam implementasi revolusi mental. Revolusi mental memang harus dimulai dari dunia pendidikan dan secara simultan berjalan di bidang-bidang lainnya.

Mengapa dunia pendidikan? Karena setidaknya selama 18 tahun, waktu anak manusia dihabiskan di bangku pendidikan, mulai Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Untuk itu,

tanggungjawab seorang guru semakin bertambah untuk ikut membentuk jati diri bangsa melalui peserta didiknya (Mulyadi *et al.*, 2008; dan Suyanto, 2009).

Menurut Agus Wibowo (2014), pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat (Wibowo, 2014). Walaupun secara formal, manusia menuntut ilmu pada lembaga pendidikan pada jangka waktu tertentu, namun prinsipnya, proses-belajar yang dialami manusia berlangsung sepanjang hayat; artinya, belajar adalah proses yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti dan terbatas pada dinding kelas (Suwirta, Saripudin & Abdulkarim eds., 2008).

Hal ini juga didasari pada asumsi bahwa di sepanjang kehidupannya, manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah, hambatan-hambatan, dan rintangan-rintangan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan ini. Prinsip belajar sepanjang hayat ini sejalan dengan empat pilar pendidikan universal, seperti yang dirumuskan oleh UNESCO (*United Nations for Education, Scientific, and Cultural Organization*) pada tahun 1990-an, dan juga dikutip oleh Khijron Mahjuro (2007) dan Sri Lindawati (2015), yaitu: *learning to know*, yang berarti juga *learning to learn*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors *et al.*, 1992; Mahjuro, 2007; dan Lindawati, 2015).

Learning to know atau *learning to learn* mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa bukan hanya sadar akan apa yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari itu.

Learning to do mengandung pengertian bahwa belajar itu bukan hanya sekedar mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi belajar untuk berbuat, dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan dalam era persaingan global.

Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang “menjadi dirinya sendiri”. Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu, dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia.

Learning to live together adalah belajar untuk bekerjasama. Hal ini sangat diperlukan, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global di mana manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya (Delors *et al.*, 1992; Mahjuro, 2007; dan Lindawati, 2015).

Berdasarkan empat pilar tersebut, berarti manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya dan merupakan kebutuhan mutlak, karena tanpa pendidikan, sangat tidak mungkin suatu kelompok manusia dapat hidup dan maju berkembang menurut konsep dan pandangan hidupnya.

Revolusi mental merupakan harapan bangsa dan masyarakat saat ini menuju perubahan jati diri bangsa yang lebih baik. Melakukan revolusi mental adalah guna membentuk revolusi karakter bangsa melalui dunia pendidikan, peneguhan dan penguatan ke-*bhinneka*-an, dan memperkuat restorasi sosial yang merupakan bagian dari titik pusat utamanya. Membentuk generasi yang kreatif dan berintelektual menjadi latar belakang diwujudkannya revolusi mental bangsa (Idris, 2012; dan Lindawati, 2015).

Oleh karena itu, bidang pendidikan sangat penting dalam menjaga pengarah dan peningkatan mutu dan kesempurnaan aset hidup bangsa. Melalui pendidikanlah akan diperoleh pemahaman-pemahaman baru dalam hal pengetahuan, keaktifan, dan kekritisan. Namun, dalam menjalankan proses revolusi mental tidak hanya dengan berbicara dan berdiskusi saja, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

PERMASALAHAN DAN METODE PENELITIAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana rumusan model pendidikan

karakter bangsa untuk mencintai produk Indonesia dan mendukung kemandirian pangan dari masa ke masa, yakni dari masa ORLA (Orde Lama) dari tahun 1959 hingga 1966, masa ORBA (Orde Baru) dari tahun 1966 hingga 1998, dan masa Reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang?

Penelitian dilakukan di tiga wilayah, yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur, Indonesia; serta di tiga PT (Perguruan Tinggi), yaitu UB (Universitas Brawijaya), UM (Universitas Negeri Malang), dan UMM (Universitas Muhammadiyah Malang). Secara metodologis, penelitian ini menggunakan formula pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (*cf* Krueger, 1988; Creswell, 1994; Somantri, 2005; dan Paramita & Kristiana, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup: pengamatan berperan-serta (observasi partisipasi), pemanfaatan dokumen (dokumentasi), dan wawancara dengan informan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam (*indepth interview*) tentang model pendidikan karakter bangsa yang berlaku pada masa ORLA, ORBA, dan era Reformasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui langkah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifying*; serta pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang masa observasi, triangulasi, *member check*, dan melakukan *peerdebriefing* (Krueger, 1988; Creswell, 1994; Somantri, 2005; dan Paramita & Kristiana, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan penulis, bersama tim, menunjukan bahwa konstruksi model pendidikan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia, yang pernah berlaku di Indonesia, sangat beragam dan tergantung pada politik pendidikan dan kebijakan pemerintah serta nomenklatur masyarakat.

Revolusi Mental sebagai sebuah Tantangan Dunia Pendidikan. Suatu tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia

diawali dari pembentukan karakter, mulai dari yang sederhana, misalnya masalah membuang sampah sembarangan dan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas, merupakan contoh perbuatan yang tidak baik dan berkaitan dengan mentalitas seseorang. Mengapa masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya; atau mengapa masih saja ada orang yang melanggar rambu-rambu lalu-lintas?

Sebagian orang beranggapan bahwa hal ini terjadi karena manusia memiliki rasa egois; dan ego lah yang menjadi penyebabnya (Efendi, 2008; dan Nagata, 2014). Dalam konteks ini, Agus Wibowo (2014) mengatakan bahwa sikap egois tidak bisa dihilangkan dari diri manusia; dan masalah mentalitas seperti ini tidak dapat dijawab dengan cara membuang ego dari diri manusia (Wibowo, 2014).

Menurut Kemendikbud RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) pada tahun 2010, dan juga dikutip dalam Sri Lindawati (2015), permasalahan mentalitas lainnya yang muncul di masyarakat, seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massal, kehidupan ekonomi yang konsumtif, serta kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi persoalan budaya dan karakter bangsa (dalam Puspito *et al.* eds., 2011; dan Lindawati, 2015).

Hal ini juga sinkron dengan apa yang menjadi sasaran dari revolusi mental di era kini. Perubahan orientasi pendidikan tersebut mengarah pada tujuan pendidikan nasional, yang merupakan rumusan mengenai kualitas manusia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Sehingga rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa (Depdiknas RI, 2003).

Menurut Bambang Indriyanto (2014) dan Sri Lindawati (2015), perubahan orientasi pendidikan tidak hanya berkutat pada perubahan kurikulum semata, namun yang terpenting saat ini adalah adanya “revolusi” dalam sikap mental, pola pikir, dan perilaku dari para pelaku pendidikan, seperti aparat,

pengelola, dan pengguna pendidikan, secara mendasar (Indriyanto, 2014; dan Lindawati, 2015). Kebijakan ini dilakukan agar dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, memperhatikan kebutuhan daerah, mampu mengembangkan seluruh potensi lingkungan dan potensi peserta didik, serta lebih mendorong peran aktif dari masyarakat. Untuk mendukung pencapaian kondisi tersebut, pengelola pendidikan hendaknya memiliki pemahaman tentang konsep pendidikan yang komprehensif (Suwirta, Saripudin & Abdulkarim eds., 2008; dan Indriyanto, 2014).

Konstruksi Model Pendidikan Karakter Bangsa dari Masa ke Masa. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD (*Focused Group Discussion*) dengan para pakar pendidikan karakter di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 10-11 Juni 2015, maka dapat dideskripsikan, sebagai berikut:

Pertama, pada masa Orde Lama, atau masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1959-1966, pendidikan karakter bangsa dilakukan dalam kerangka *nation and character building*. Hal ini ditandai juga bahwa pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia (1945), tujuan pendidikan nasional adalah membentuk warga negara yang demokratis serta membangun karakter peserta didik yang cinta pada Tanah Air dan punya jiwa patriot yang tinggi (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015).

Sementara itu, gerakan untuk mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia ditandai dengan jargon politis yang dikenal dengan “Trisakti Revolusi Indonesia”, yaitu: berdaulat di bidang politik, di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan (wawancara dengan Responden B, 11/6/2015).

Secara historis dan sosio-kultural, pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kata-kata mutiara yang tertuang dalam berbagai dokumen sejarah politik

dan ketatanegaraan, seperti dalam naskah Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Pembukaan UUD NKRI (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia) tahun 1945, serta yang tercermin dalam lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan lagu-lagu perjuangan lainnya, merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan komitmen bangsa Indonesia yang harus diwujudkan sepanjang hayat (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015).

Adalah Presiden Soekarno, tokoh yang pertama kali melontarkan pentingnya masalah *nation building* ini dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1957. Presiden Soekarno melihat bahwa *nation building* sebagai fase kedua dalam revolusi Indonesia sesudah fase pertama yang dinamakan fase *liberation*, yaitu pembebasan Indonesia dari penjajah Belanda (Soekarno, 1965; Legge, 1985; dan Adam, 2007). Permasalahan ini dikedepankan sebagai tanggapan terhadap keadaan Indonesia pada saat itu, yang ditandai oleh makin kuatnya kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, daerah, dan partai di atas kepentingan negara dan bangsa, serta makin lunturnya idealisme (wawancara dengan Responden C, 10/6/2015).

Pentingnya *character building* juga disampaikan oleh Presiden Soekarno pada Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1962. Ketika itu, *character building* dikaitkan dengan *nation building* dan perjuangan pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa masalah Irian Barat ini seharusnya sudah diserahkan kedaulatannya dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia, yakni “satu tahun” setelah penandatanganan KMB (Konferensi Meja Bundar) pada tahun 1949. Tetapi, sampai dengan tahun 1960-an, pemerintah Belanda belum ada tanda-tanda untuk menyerahkannya, sehingga Presiden Soekarno mencanangkan Tri Kora (Tiga Komando Rakyat) untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda (Soekarno, 1965; Legge, 1985; dan Adam, 2007).

Jika memperhatikan iklim kehidupan sosial-politik masa Orde Lama (1959-1966) seperti itu, maka pembinaan karakter dalam lingkungan keluarga, termasuk ihwal ketahanan pangan dan cinta produk dalam negeri, tentu saja akan menjadi kiblat utama. Hal tersebut diperkuat oleh kebijakan Presiden Soekarno tentang *Berdikari* (berdiri di atas kaki sendiri), yakni Indonesia ingin mandiri yang diterapkan dalam berbagai bidang: ekonomi, sosial, politik, bahkan olah raga dengan diselenggarakannya GANEFO atau *Games of New Emerging Forces* pada tahun 1964 (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015; dan wawancara dengan Responden B, 11/6/2015).

Jadi, urusan pembinaan karakter pada masa Orde Lama sangat *powerfull*. Pembinaan karakter di sekolah, pada masa Orde Lama, utamanya melalui mata pelajaran *Civics*, yang tampil sebagai indoktrinasi politik (Koesoema, 2010; dan Sunarso, 2012). Manakala pembinaan karakter bagi masyarakat pada masa Reformasi, dari tahun 1998 hingga sekarang, dilakukan melalui organisasi politik atau partai politik kepada kader-kader partai; dan juga oleh organisasi sosial-keagamaan kepada umatnya (wawancara dengan Responden C, 10/6/2015).

Kedua, pada masa Orde Baru (1966-1998), pendidikan karakter bangsa dilakukan dalam kerangka stabilitas nasional dan pemantapan jati diri bangsa. Ketika Orde Baru berkuasa, tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi mutunya. Pada masa itu, gerakan untuk mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia ditandai dengan adanya program swasembada beras dan pangan secara nasional, dan *swadesi* untuk mencintai produk Indonesia (wawancara dengan Responden B, 11/6/2015). Jargon politik yang dikembangkan adalah melalui "Trilogi Pembangunan", yaitu: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Moertopo, 1974; Both & McIlwley, 1983; dan Mas' oed, 1989).

Pada masa Orde Baru pula, pendidikan karakter menggunakan P4 (Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada era ini, pendidikan karakter bertumpu pada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Targetnya adalah seluruh orang Indonesia, mulai dari para pemimpinnya sampai orang-orang awam di perdesaan, yang harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan moral Pancasila (wawancara dengan Responden C, 10/6/2015).

Strategi yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan penataran P4 bagi pimpinan dan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Bagaimana halnya penerapannya di lingkungan keluarga? Untuk keluarga, diperkenalkan program GHBP, yakni Gerakan Hidup Berbudaya Pancasila, yang menyentuh semua desa-desa di Indonesia. Jadi, dari segi program pembinaan karakter (termasuk ihwal ketahanan pangan dan cinta produk dalam negeri) pada masa Orde Baru juga sangat *powerfull* (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015; dan wawancara dengan Responden B, 11/6/2015).

Ketiga, di era Reformasi (1998-sekarang), pendidikan karakter dilakukan dalam kerangka totalitas proses psikologis, sosial-kultural, dan bersifat multidimensional. Hal ini terbukti dari tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab (Kemendiknas RI, 2003).

Politik pendidikan diarahkan pada pembentukan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Pemerintah berusaha menggalakan dan mengkampanyekan pemakaian produksi nasional, minimal di instansi publik dan membangkitkan serta mendorong rakyat untuk "cinta produk-produk Indonesia", sehingga produk nasional menjadi produk kebanggaan di negeri sendiri dan dapat bersaing dengan impor di era perdagangan bebas (wawancara dengan Responden B, 11/6/2015).

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pembinaan karakter di sekolah dilakukan melalui mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), yang pada tahun 1968 menjadi salah satu unsur dari PKN

(Pendidikan Kewargaan Negara), yang bernuansa pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Somantri, 2001). PKN pada 1969 tampil dalam bentuk pengajaran Konstitusi dan Ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Manakala PKN pada 1973, diidentikkan dengan pengajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial (Somantri, 2001; dan Winataputra, 2011).

Selanjutnya, dalam Kurikulum Tahun 1975, untuk semua jenjang persekolahan, yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun 1976 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1984, maka sebagai pengganti mata pelajaran PKN adalah mulai diperkenalkan mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila), yang berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau disebut juga *Eka Prasetya Pancakarsa* (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015).

Perubahan itu dilakukan untuk mewadahi misi pendidikan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Mata pelajaran PMP ini bersifat wajib, mulai dari kelas I SD (Sekolah Dasar) sampai dengan kelas III SMA/K (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan); dan keberadaannya terus dipertahankan dalam Kurikulum Tahun 1984, yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Tahun 1975 (Somantri, 2001; Winataputra, 2011; dan wawancara dengan Responden A, 10/6/2015).

Pada tahun 1989, Indonesia memiliki undang-undang pendidikan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Pada Pasal 39, antara lain, mewajibkan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib dalam kurikulum untuk semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum Tahun 1994, diperkenalkan

mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/ artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila (Somantri, 2001; Winataputra, 2011; dan Farisi & Malik, 2015).

Masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto selama kurang-lebih 32 tahun, yakni sejak tahun 1966 hingga 1998. Kondisi sosial-politik selama masa Orde Baru, yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan karakter di lingkungan keluarga, yakni pada awal pemerintahan, pertengahan, dan akhir pemerintahan tentu tidak dapat disamakan. Pada awal pemerintahan Orde Baru, secara umum, pendidikan karakter di lingkungan keluarga penuh dengan semangat yang mencita-citakan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Bangsa Indonesia yang sedang mengalami masalah kesulitan pangan, mulai terangkat kehidupan ekonomi setelah negara menemukan kekayaan alam berupa minyak bumi (wawancara dengan Responden B, 11/6/2015).

Dengan acuan strategi pembangunan berdasarkan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), keluarga Indonesia memiliki mimpi akan tumbuhnya ekonomi yang lebih baik. Ditunjang dengan tekad pemerintah yang memiliki visi melaksanakan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) Tahun 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada pertengahan masa pemerintahan Orde Baru, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No.II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Melalui kebijakan inilah, pendidikan karakter di lingkungan keluarga mendapat pengaruh P4 (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015).

Pada masa pertengahan hingga menjelang berakhirnya Orde Baru, pemerintah mulai mendekati tokoh-tokoh agama (ulama Islam) yang ditandai oleh mulai tumbuh suburnya kehidupan beragama, yang sebelumnya mendapat kekangan dari pemerintah, misalnya pemerintah mulai merapat dalam

kegiatan keagamaan melalui pengajian-pengajian dan perayaan keagamaan yang lebih intensif. Kondisi ini berpengaruh pula pada pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

Namun, pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, dan sejalan dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi, dan media, serta perkembangan politik dan ekonomi global yang umumnya membawa nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme dengan menyusup/mendompleng pada sistem demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia), ditambah oleh kondisi ekonomi negara yang terpuruk, maka pendidikan karakter di lingkungan keluarga semakin longgar, apalagi institusi P4 yaitu BP7 (Badan Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan P4) dibubarkan. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter di lingkungan keluarga, karena anak lebih banyak menerima informasi dari media, khususnya televisi, sementara orang tua tidak mampu mengendalikan. Dengan demikian, contoh dan penerapannya dalam model keteladanan dari pemimpin masih kuat (wawancara dengan Responden C, 10/6/2015).

Di era Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, wacana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter meletakkan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral dalam masyarakat pluralis yang demokratis. Dengan kata lain, perjuangan dan pemerolehan hak sipil, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dan politik diyakini akan lebih mudah dicapai (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015). Upaya itu diwujudkan, misalnya, melalui Amandemen UUD 1945 NKRI (Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan keinginan untuk merestorasi Pancasila (Efendi, 2008; dan Koesoema, 2010).

Akan tetapi, setelah hampir sewindu, kelihatannya harapan ini tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berekspresi, dimana kesempatan yang tersedia memang jauh lebih luas (tidak terkekang) dibandingkan dengan kesempatan pada masa rezim Orde Lama

(1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998) yang otoriter. Di lain pihak, di era “transisi demokrasi”, bangsa Indonesia justru dihadapkan pada pelbagai fenomena yang mempengaruhi kewarganegaraannya, seperti nasionalisme ekonomi, etika sosial, pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, dan multikulturalisme (Liddle, 1992; dan Indriyanto, 2014). Semua masalah yang disebut belakangan ini merupakan tantangan berat dalam revitalisasi cita sipil, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan (wawancara dengan Responden C, 10/6/2015).

Jadi, pada era Reformasi, pembinaan karakter pada lingkungan keluarga kalah gencar dari pengaruh media massa, utamanya televisi dan internet (Iksan & Ningrum, 2014). Buktinya, karakter masyarakat Indonesia, termasuk generasi mudanya, tampak kurang menggembirakan. Beberapa indikasinya adalah sebagai berikut:

Pertama, munculnya karakter buruk yang ditandai oleh kondisi kehidupan sosial-budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan-santun, dan pandai berbasa-basi, sekonyong-konyong menjadi bangsa yang pemaarah, suka mencaci, pendendam, membakar manusia hidup-hidup di keramaian kota, mutilasi, serta perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling bunuh di jalanan (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015).

Kedua, dalam tiga dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami proses “kehilangan”, mulai dari kehilangan dalam aspek alam fisik, alam hayati, manusia, dan budaya. Dalam aspek alam fisik, Indonesia telah kehilangan tanahnya yang subur. Luas tanah kritis di Indonesia pada tahun 2008, menurut perkiraan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial, Departemen Kehutanan RI (Republik Indonesia), ditaksir 77.8 juta hektar. Tanah kritis ini diperkirakan akan terus bertambah

satu juta hektar setiap tahunnya (dalam Suarna, 2004).

Responden B, seorang pakar tentang lingkungan dan juga pendidikan karakter dari UB (Universitas Brawijaya) di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:

Kita makin kehilangan hak guna tanah untuk perkebunan, karena semakin banyaknya perusahaan asing yang bergerak di bidang perkebunan di Indonesia. Dalam aspek alam hayati, Indonesia telah kehilangan hutan tropis. Indonesia sekarang dikenal sebagai negara dengan laju *deforestasi* tertinggi di dunia. Kita juga kehilangan kekayaan alam yang berasal dari laut, yang diambil secara *illegal* oleh penjarah, baik dari dalam maupun luar negeri (wawancara dengan Responden B, 11/6/2015).

Dalam aspek manusia pula, Indonesia kehilangan daya saing. Dalam *World Competitiveness Scoreboard* tahun 2007, Indonesia menempati peringkat 54 dari 55 negara, turun dari peringkat 52 pada tahun 2006 (dalam Raka, 2008; dan Kemendag RI, 2010). Bangsa Indonesia kehilangan imej dan kemauan untuk mentaati hukum, bahkan mentaati aturan yang paling sederhana, yaitu aturan berlalu-lintas (Raka, 2008:3).

Dalam aspek budaya, bangsa Indonesia sudah kehilangan kecintaan terhadap kesenian tradisional sebagai warisan budaya adiluhung bangsa. Sebagian dari bangsa Indonesia sudah kehilangan kejujuran dan rasa malu. Sudah sekian lamanya Indonesia mendapat predikat sebagai salah satu negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi di dunia. Celakanya, predikat ini tidak membuat kita merasa malu dan korupsi nyatanya terus berlangsung dengan *modus operandi* yang berubah-ubah (wawancara dengan Responden C, 10/6/2015).

Dalam konteks ini, Responden C, seorang pakar tentang pendidikan karakter dari UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) di Jawa Timur, Indonesia, lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:

Kita telah kehilangan rasa ke-Indonesia-an kita. Tampaknya, kita makin menonjolkan kepentingan daerah dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Kita kehilangan cita-cita bersama (*in-group feeling*)

sebagai bangsa. Tiada lagi *Indonesian Dream*, yang mengikat kita bersama, yang lebih menonjol adalah cita-cita golongan untuk mengalahkan golongan lain. Jadi, pembinaan karakter pada masa Reformasi, termasuk dalam lingkungan keluarga, terabaikan (wawancara dengan Responden C, 10/6/2015).

Pada era Reformasi, pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru sejak tahun 1998, yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru ke arah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih dinamis, PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara, yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) Tahun 1945 (Somantri, 2001; Winataputra, 2011; dan Farisi & Malik, 2015).

Ketiga, model pendidikan karakter pada masa Reformasi, di lingkungan keluarga, lebih banyak dipengaruhi oleh media, baik cetak maupun elektronik; dan yang paling dominan adalah elektronik, terutama televisi dan internet (Iksan & Ningrum, 2014). Dalam konteks ini, Responden A, seorang pakar tentang pendidikan karakter dari UM (Universitas Negeri Malang) di Jawa Timur, Indonesia, lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:

Orang tua semakin kesulitan mengendalikan anak-anaknya dalam mendidik sikap dan perilaku, karena sangat deras arus informasi yang bersifat global dan tanpa batas. Pihak pemerintah pun telah tergerus oleh pengaruh globalisasi dan tidak berdaya dalam mengatasi atau memfilter pengaruh asing, karena sistem global yang sangat kuat; sementara kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia belum kuat berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015).

Kondisi kehidupan keluarga yang beragam, karena banyaknya jumlah etnis dan dilengkapi oleh rendahnya kualitas

SDM (Sumber Daya Manusia), merupakan faktor-faktor yang semakin melemahkan dan terpuruknya pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Bangsa Indonesia betul-betul belum siap dalam memasuki era globalisasi, yang intinya adalah persaingan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Contoh model dan penerapannya dalam lingkungan keluarga, di era globalisasi ini, adalah model pendidikan agama dan budaya yang terbatas dan terinfiltrasi oleh pengaruh media (Suyanto, 2009; dan Iksan & Ningrum, 2014).

Isu terkini adalah pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Republik Indonesia), memperkenalkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah (Yani, 2016). Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter adalah, yang menarik dari kurikulum tersebut, telah diubah kembali nama mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Perubahan dimaksudkan agar mata pelajaran tersebut kembali mengedepankan pembinaan nilai-moral Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) Tahun 1945 kepada para siswa (Somantri, 2001; Winataputra, 2011; dan Farisi & Malik, 2015).

Perkembangan model pendidikan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia di lingkungan keluarga pada masa sekarang ini, di era pemerintahan Jokowi-JK (Joko Widodo dan Jusuf Kalla), adalah mendasarkan kebijakan pembangunannya pada *Nawacita*. Penjelasan *Nawacita* tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis.
- (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

- (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera.
- (6) *Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.*
- (7) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- (8) *Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.*
- (9) Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an.²

Bertolak dari *Nawacita* tersebut, mestinya pemerintahan sekarang menjanjikan perbaikan, termasuk dalam pembinaan karakter warganegara. Misalnya *Nawacita* nomor 6, yang hendak mewujudkan kemandirian ekonomi yang tentu saja harus dimulai dari adanya ketahanan pangan dan warganya harus cinta produk dalam negeri. Mengapa demikian? Jika masyarakat cinta produk dalam negeri, maka permintaan dalam negeri meningkat atas barang dan jasa produk bangsa Indonesia sendiri. Akibatnya, produksi meningkat, tenaga kerja terserap, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat pula. Namun, tampaknya, kita harus masih menunggu, karena kondisi demikian masih belum tampak sekarang (wawancara dengan Responden B, 11/6/2015).

Pusat Kurikulum di Kemendikbud RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), pada tahun 2010, telah menyusun strategi pendidikan karakter melalui empat hal, yakni: pembelajaran atau *teaching*, keteladanan atau *modelling*, penguatan atau *reinforcing*, dan pembiasaan atau *habituating* (Mulyadi *et al.*, 2008; AIPI, 2010; dan Sudrajat, 2010). Nilai-nilai dalam pendidikan karakter diambil dari empat sumber utama, yakni: agama,

²Lihat, misalnya, "*Nawa Cita*: 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK". Tersedia secara online di: <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 4 Juli 2016]. Kalimat tebal dan miring di atas adalah dari kami (penulis).

budaya, Pancasila, dan tujuan pendidikan. Kemendikbud RI juga telah menetapkan 18 nilai utama dalam pendidikan karakter, yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Mulyadi *et al.*, 2008; AIPI, 2010; dan Sudrajat, 2010).

Di level sekolah, guru menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan pendidikan karakter, karena mereka yang langsung berinteraksi dengan anak didik. Guru, sesuai asal katanya yakni *digugu* (dipercaya) dan *ditiru* (menjadi tauladan), memegang peranan penting. Sayangnya, profil guru yang baik dari segi profesionalitas, kompetensi, kesejahteraan, dan pemerataan guru antara kota dan desa masih belum maksimal di Indonesia ini (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015).

Selain itu disadari bahwa, bagaimanapun, pendidikan karakter itu baru dalam koridor “revolusi mental” yang digagas oleh pemerintahan Jokowi-JK (Joko Widodo dan Jusuf Kalla). Oleh karena itu, pendidikan karakter akan saling terkait dengan aspek lainnya dalam kehidupan bernegara, seperti agama, budaya, sosial, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu pula, maka pendidikan karakter di sekolah saja tidak cukup. Porsi yang besar justru dari keluarga dan masyarakat (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015). Pembentukan karakter juga mensyaratkan sistem politik yang sehat, penegakan hukum yang adil, kesejahteraan masyarakat yang makin merata, dan penghargaan masyarakat atas nilai, norma, dan konsitusi yang sudah disepakati bersama (Muttaqin *et al.*, 2006; Elmubarok, 2009; dan Sudrajat, 2010).

Pendidikan diarahkan pada upaya memanusiakan manusia, atau membantu proses *hominisasi* dan humanisasi. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan dan proses pendidikan harus mampu membantu peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi, seperti bermoral, berwatak, bertanggungjawab, dan

bersosialitas. Para peserta didik juga perlu dibantu untuk hidup berdasarkan pada nilai moral yang benar, mempunyai watak yang baik, dan bertanggungjawab terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks inilah pendidikan karakter dan budi pekerti sangat diperlukan dalam kehidupan peserta didik di era globalisasi (Efendi, 2008; Elmubarok, 2009; dan Suyanto, 2009).

KESIMPULAN

Konstruksi model pendidikan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia, yang pernah berlaku di Indonesia, sangat beragam, dan tergantung pada politik pendidikan dan kebijakan pemerintah serta nomenklatur masyarakat. Keberagaman model pendidikan karakter bangsa yang dikembangkan di era Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Orde Reformasi (1998-sekarang) dapat dilihat dari tujuan pendidikan, politik pendidikan, jargon politis, dan gerakan yang dibangun untuk mendukung program kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia pada kurun waktu yang ada.

Bangsa Indonesia menghadapi krisis jati diri. Nilai-nilai Pancasila, sebagai falsafah dan ideologi bangsa, sudah banyak dilupakan. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kepada rakyat Indonesia untuk kembali ke jati dirinya. Nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengembalikan jati diri dan karakter bangsa adalah melalui revolusi mental.

Di tengah fenomena semakin menurunnya karakter bangsa, pendidikan karakter perlu semakin dikuatkan melalui jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal. Keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi tiga institusi penting yang perlu bersinergi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter melalui revolusi mental.

Perubahan pola pikir menjadi kunci utama dalam revolusi mental. Perlu proses, kesungguhan, dan komitmen untuk cepat berubah. Selain faktor manusianya, juga perlu disiapkan sistem

yang membuat masyarakat mau mengubah atau memperbaiki mentalitasnya melalui konstruksi model pendidikan karakter bangsa berbasis gerakan cinta produk Indonesia, sebagai upaya merekonstruksi jati diri dan karakter bangsa Indonesia, dengan berdasarkan kepada nilai-nilai agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan budaya lokal.³

Referensi

- Adams, Cindy. (2007). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, Terjemahan.
- AIPI [Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia]. (2010). *Rekomendasi Peran Pendidikan dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Artikel "Revolusi Mental dalam Dunia Pendidikan". Tersedia secara online di: <http://www.riapos.co/4196-opini-revolusi-mental-dalam-dunia-pendidikan> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 18 Oktober 2016].
- Artikel "Revolusi Mental dari Presiden Joko Widodo". Tersedia secara online di: <https://wikipedia.2014/> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 18 Oktober 2016].
- Both, Anne & Peter Mclawley. (1983). *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Delors, Jaques et al. (1992). *Learning: The Treasure Within*. Bangkok: UNESCO Publishing Report to UNESCO of International Commission on Educational for the Twenty-first Century. Tersedia secara online juga di: <http://unesdoc.unesco.org/images/pdf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 5 September 2016].
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Depdiknas RI.
- Efendi, Taufiq. (2008). *Jati Diri Bangsa Indonesia: Menuju Indonesia Jaya*. Jakarta: Exatama Mediasindo.
- Elmubarak, Z. (2009). *Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Farisi, M.I. & A. Malik. (2015). "Pendidikan IPS sebagai *Synthetic Discipline*: Kajian Epistemologis atas Pemikiran Nu'man Somantri". Tersedia secara online di: <http://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/viewFile/4183/pdf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 5 September 2016].
- Idris, Mohammad. (2012). "Tugas Pendidikan Pancasila: Membangun Karakter Generasi Muda". Tersedia secara online di: <http://research.amikom.ac.id/index.php/SSI/article/viewFile/6551/4098> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 18 Oktober 2016].
- Iksan, Muhammad & Mei Vita Romadon Ningrum. (2014). "Peran Media Massa dalam Pembentukan Karakter". Tersedia secara online di: <http://www.fkipunsa.ac.id/peran-media-massa-dalam-pembentukan-karakter-2/.html> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 4 Juli 2016].
- Indriyanto, Bambang. (2014). "Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan" dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.20, No.4 [Desember]. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/165-613-1-PB.pdf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 4 Juli 2016].
- Iriany, Ieke Sartika. (2014). "Pendidikan Karakter sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa" dalam *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol.08, No.01, hlm.54-85. Tersedia juga secara online di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/55-98-1-PB.pdf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 20 Mei 2016].
- Kemendag RI [Kementerian Perdagangan Republik Indonesia]. (2010). *Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, Periode 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tersedia secara online juga di: <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/06/rencana-strategis-2010-2014-id0-1354733374.pdf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 20 Mei 2016].
- Kemendiknas RI [Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Koesoema, Doni. (2010). *Pendidikan Karakter*. Roma: FIP UKS [Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Kepausan Salesian], Terjemahan.
- Krueger, Richard A. (1988). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. California: Sage Publications.
- Legge, John D. (1985). *Sukarno: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: PT Sinar Harapan, Terjemahan.
- Liddle, William. (1992). *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Masa Awal Orde Baru*. Jakarta: Grafiti Press, Terjemahan.
- Lindawati, Sri. (2015). "Revolusi Pendidikan Karakter: Suatu Tantangan Dunia Pendidikan Indonesia dalam Melahirkan Generasi Emas". Tersedia secara online di: <https://srlinda.wordpress.com> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 18 Oktober 2016].
- Mahjuro, Khijron. (2007). "Pilar-pilar Pendidikan: Rekomendasi UNESCO dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN [Institut Agama Islam Negeri] Walisongo. Tersedia secara online juga di: <http://library.walisongo.ac.id/> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 20 Mei 2016].
- Mas'ood, Muhtar. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik*

³*Pernyataan*: Kami, dengan ini, menyatakan bahwa makalah penelitian kami ini bersifat original, bukan hasil plagiat, dan belum pernah atau tidak sedang diajukan kepada redaksi jurnal nasional lain. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Orde Baru, 1966-1971. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Moertopo, Ali. (1974). *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: Penerbit CSIS.
- Mulyadi, Seto et al. (2008). *Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter?* Yogyakarta: Tiara Wacana, cetakan pertama.
- Muttaqin, Tatang et al. (2006). *Membangun Nasionalisme Baru: Bingkai Ikatan Kebangsaan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Bappenas [Badan Perancang Pembangunan Nasional].
- Nagata, Daniel. (2014). "Cara Menghilangkan Sifat Egois dalam Pergaulan Sehari-hari Ketika Berada di Lingkungan Baru". Tersedia secara online di: <http://www.danzierng.com/2014/09/dua-sisi-egoisme.html#sthash.LNj0NFis.dpuf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 20 Mei 2016].
- "Nawa Cita: 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK". Tersedia secara online di: <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 4 Juli 2016].
- Nuh, Muhammad. (2015). "Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional". Tersedia secara online di: <http://fisip.ilearn.unand.ac.id/> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 20 Mei 2016].
- Paramita, Astridya & Lusi Kristiana. (2013). "Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif" dalam *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol.16, No.2 [April], hlm.117-127. Tersedia secara online juga di: <http://oaji.net/articles/2015/820-1444709885.pdf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 20 Mei 2016].
- Puspito, Nanang T. et al. [eds]. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Raka, I.I.D.G. (2008). *Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa: Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi*. Bandung: Majelis Guru Besar ITB [Institut Teknologi Bandung].
- Shulhan, Najib. (2010). *Pendidikan Berbasis Karakter*. Surabaya: Jaring Pena, cetakan pertama.
- Soekarno. (1965). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Somantri, M.N. (2001). *Mengagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PPs UPI [Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia] dan Remaja Rosdakarya, editor D. Supriadi & R. Mulyana.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. (2005). "Memahami Metode Kualitatif" dalam *MAKARA: Sosial Humaniora*, Vol.9, No.2 [Desember], hlm.57-65. Tersedia secara online juga di: <http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 4 Juli 2016].
- Suarna, Endang. (2004). "Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan suatu Metodologi untuk Perkebunan Energi pada Lahan Kritis di Pulau Jawa". Tersedia secara online di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/297-557-1-PB.pdf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 4 Juli 2016].
- Sudrajat, Akhmad. (2010). "Karakter". Tersedia secara online di: <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 20 Mei 2016].
- Sunarso. (2012). "Kepentingan Politik Penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia". Tersedia secara online di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/3653-9435-1-SM.pdf> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 4 Juli 2016].
- Suratno. (2014). "Pendidikan Karakter dan Revolusi Mental". Tersedia secara online di: <http://www.nu.or.id/post/read/55601> [diakses di Kota Malang, Indonesia: 20 Mei 2016].
- Suwirta, Andi, Didin Saripudin & Aim Abdulkarim [eds]. (2008). *Lifelong Education in Southeast Asian Countries: A Retrospect and Prospect for Gaining and Enhancing Prosperity, Progress, and Democracy*. Bandung: ASPENSI [Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia] Press.
- Suyanto, Slamet. (2009). *Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz.
- Wawancara dengan Responden A, seorang pakar pendidikan karakter dari UM (Universitas Negeri Malang), di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 10 Juni 2015.
- Wawancara dengan Responden B, seorang pakar pendidikan karakter dari UB (Universitas Brawijaya), di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 11 Juni 2015.
- Wawancara dengan Responden C, seorang pakar pendidikan karakter dari UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 11 Juni 2015.
- Wibowo, Agus. (2014). *Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi: Membangun Karakter Ideal Mahasiswa di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winataputra, U.S. (2011). "Dinamika Konseptualisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPIS) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Pendidikan Dasar dan Menengah: Suatu Telaah *Collective Mindset* dalam Ranah Historis-Epistemologis" dalam *Jurnal Pendidikan*, 12(1), hlm.1-20.
- Yani, Ahmad. (2016). "Penundaan Implementasi Kurikulum 2013 di Indonesia: Perspektif Budaya dan Sosial-Politik di Era Kabinet Jokowi-JK" dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.9(1) May, hlm.153-172. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.